

# PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

Hamdin Husin<sup>1</sup>  
[Hamdin.husin@gmail.com](mailto:Hamdin.husin@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut.

Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut. Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD. Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah. Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) menunjukkan persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu *Agency Theory*, *Contingency Theory*, dan *Prospect Theory*.

**Kata Kunci:** PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah.

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.*

*This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the*

---

<sup>1</sup> Dosen FISIP UNTIKA Luwuk

population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bappeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bappeda Staff, Dispenda Staff, BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.

Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory.

**Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.**

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN, 2000:8). Di samping mengeluarkan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Draft Standar Akuntansi Pemerintahan pada bulan Oktober 2002 yang merupakan hasil kerjasama antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Selama standar tersebut belum disahkan, Pemda dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman kepada kebijakan akuntansi pemerintahan yang terdapat dalam peraturan-perundangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Draft Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut telah disahkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan" yang berlaku mulai tahun anggaran 2006. Standar akuntansi yang baku diperlukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi yang baku dan mudah dipahami diperlukan sebagai pedoman dalam penyajian informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kepada pihak yang berkepentingan. Dengan standar segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan. Konsep-konsep baru yang diperkenalkan dalam peraturan-peraturan baru terutama Standar Akuntansi Pemerintahan, secara konseptual dan filosofis belum banyak dipahami oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah. Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) banyak yang mempunyai persepsi bahwa paket peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan standar akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkesan dibuat tergesa-gesa tidak ada koordinasi ditingkat Pemerintah Pusat dalam membuat dan menetapkan peraturan

pelaksanaan pada tingkat operasional yang lebih rendah. Hal ini membuat kebingungan Pemda dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Pusat. Masing-masing PPKD mempunyai persepsi yang berbeda-beda atas implementasi peraturan-peraturan baru dan kebijakan akuntansi pemerintahan. Sementara ada yang merasakan bahwa implementasi sistem baru akan menimbulkan ancaman terhadap rasa aman, bahkan dapat mengancam kelangsungan kedudukannya. Sebaliknya, yang lain merasakan bahwa implementasi sistem baru akan memperkuat kedudukannya. Terdapat dua dimensi yang menggambarkan persepsi seseorang atas implementasi sistem baru, yaitu perasaan kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perasaan kemudahan (*perceived ease of use*) (Adam, 1992:227). Persepsi seseorang terhadap situasi yang dihadapi akan mempengaruhi peran orang tersebut (Singh, 2002:280). Persepsi seseorang terhadap situasi kerja akan mempengaruhi peran apa yang seharusnya dilakukan, dan mempengaruhi produktivitasnya lebih daripada situasi yang dipersepsikan (Robin, 2005:145).

Sikap manusia cenderung menentang situasi kerja yang mengalami perubahan, tetapi dalam diri individu terdapat kadar sikap yang berbeda-beda. Manusia cenderung menerima perubahan manakala perubahan tersebut menguntungkan atau memberi kesempatan promosi, dan sebaliknya akan menolak bila perubahan yang terjadi merugikan atau mengancam kedudukannya. Perilaku manusia tersebut selaras dengan teori prospek (*prospect theory*) yang dipelopori oleh Kahneman dan Tversky (dalam Gudono, 1998:2). Disadari bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Hambatan-hambatan tersebut antara lain berasal dari; legal prosedural, pimpinan (khususnya pimpinan menengah ke bawah), staf, konseptual, dan hambatan berupa mispersepsi tentang implementasi kebijakan dan peraturan-peraturan baru (Warsito, 2004:198).

Sumber daya manusia di daerah pada umumnya belum siap dan kurang mempunyai pemahaman yang memadai tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah (Ditjen Otda, 2002). Mereka sudah merasa enak dengan sistem lama yang selama ini dijalankan, walaupun landasan filosofinya kurang dipahami. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijalankan sudah melekat dalam tugas dan tanggungjawab setiap pengelola keuangan daerah di setiap unit kerja.

Manajemen Pemda, dalam hal ini, dituntut untuk membangun instrumen informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (*intern*) Pemda, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak di luar (*extern*) Pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.

Di sisi lain, untuk mewujudkan kinerja Pemda yang sesuai dengan *value for money* (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pejabat pengelola keuangan dan fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan Pemda (Mardiasmo, 2002b:218). Peran manajerial menurut Mintzberg (1973:75), terdiri atas: peran perseorangan, peran informal, dan peran keputusan. Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern (*internal auditing*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton, 2006:980).

Selama ini ada anggapan bahwa lembaga pemeriksa fungsional-ekstern tidak mampu mengemban fungsinya dengan efektif, demikian juga lembaga pemeriksa-fungsional-intern yang berlapis-lapis pada umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Usman Damanik, 2001:19). Pemda merasa bahwa audit yang dilakukan terlalu banyak sehingga terjadi tumpang tindih audit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun ekstern.

Tumpang tindih tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan terus-menerus sehingga *auditee* lebih merasakannya sebagai beban daripada bantuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah. Di samping itu, aparat pemeriksa fungsional pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugasnya sering mengalami hambatan-hambatan misalnya adanya budaya ewuh pakewuh. Berdasarkan gambaran pada latar belakang, perlu dikaji lebih jauh dengan melakukan penelitian tentang "Pengaruh Persepsi PPKD terhadap Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran

Manajerial PPKD pada pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut". Jika tidak dilakukan penelitian ini, maka: (1) tidak ada informasi tentang persepsi PPKD pada Pemda di Banggai Laut mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan pengaruhnya terhadap peran manajerial PPKD, fungsi pemeriksaan intern, dan kinerja Pemda; (2) tidak diperoleh informasi tentang implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemda di Banggai Laut dan pengaruhnya terhadap peran manajerial PPKD, fungsi pemeriksaan intern, dan kinerja Pemda; (3) tidak dapat diketahui besarnya pengaruh peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pemda; dan (4) tidak dapat diketahui besarnya pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Persepsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Mengenai Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

Persepsi menurut Robbins (2005:104) adalah *"a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment"*. Hellriegel (1992:84) mendefinisikan *"perception is the selection and organization of environmental stimuli to provide meaningful experiences for the perceives"*. Sejalan dengan definisi persepsi tersebut, Dunham (1984:241) menyatakan bahwa *"perception is the process by which you access information from the environment, organize it, and obtain meaning from it"*. Dari beberapa definisi tersebut, dapat digambarkan bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Persepsi atas masalah yang dilihat dan dihadapi seseorang banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (Greenberg, 2003:39). Adams(1992:227) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi perasaan yang menggambarkan persepsi implementasi sistem, yaitu perasaan kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perasaan kemudahan (*perceived ease of use*).

Davis (1989:320) mendefinisikan perasaan kemanfaatan sebagai berikut: *"perceived usefulness as the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance"*. Definisi tersebut menggambarkan bahwa *perceived usefulness* merupakan suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu objek tertentu akan dapat meningkatkan kinerja seseorang. Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemda dapat meningkatkan kinerja Pemda. Implementasi standar akuntansi pemerintahan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemda dalam menyelesaikan tugasnya. Apa yang dipersepsikan oleh seseorang dari situasi kerja mereka akan mempengaruhi produktivitas mereka lebih daripada situasi yang dipersepsikan (Greenberg, 2003:51). Sedangkan perasaan kemudahan (*perceived ease of use*) menurut Davis (1989:320), adalah *"as the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort"*. *Ease as freedom from difficulty or great effort*. Definisi tersebut menggambarkan bahwa *perceived ease of use* merupakan suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa implementasi sesuatu sistem akan mengurangi upaya seseorang. Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan akan membantu dan mempermudah manajemen Pemda dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dibanding dengan tidak ada kebijakan akuntansi.

Persepsi pimpinan mengenai implementasi kebijakan akuntansi ditinjau dari *Prospect Theory*, akan berakibat adanya kecenderungan untuk menerima kebijakan akuntansi pemerintahan, manakala yakin bahwa implementasi kebijakan tersebut akan membawa keuntungan. Sebaliknya, pimpinan akan cenderung menolak kebijakan akuntansi pemerintahan, manakala yakin bahwa implementasi kebijakan tersebut akan membawa kerugian.

Kebijakan akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya kebijakan akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi yang negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pemeriksaan (Jones, 2000:148).

Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-

ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, dimana bisa diperiksa segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Implementasi kebijakan akuntansi di samping dapat membantu fungsi transparansi dan akuntabilitas, juga dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena kebijakan memberikan landasan konseptual tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan (Hendriksen, 2005:129).

Di muka telah disebutkan bahwa persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan ditinjau dengan *Prospect Theory*, akan mempengaruhi peran PPKD dalam implementasi kebijakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. PPKD akan mendukung dan ikut berperan aktif pada setiap kebijakan Pemda manakala implementasi kebijakan tersebut bermanfaat dan menguntungkan. Sebaliknya PPKD akan menunjukkan sikap yang kurang mendukung atau kurang berperan bahkan menolak pada setiap implementasi kebijakan manakala kebijakan tersebut dianggap merugikan. Keyakinan kemanfaatan dan keuntungan atas implementasi kebijakan, akan membuat PPKD menjadi lebih tahu alasan di balik implementasi kebijakan tersebut, serta peran apa yang perlu dilakukan supaya implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik. Penelitian Koberg dan Chusmir (1987) dalam Dunk (1997:650) menunjukkan bahwa pimpinan yang merasa yakin atas manfaat anggaran, memiliki motivasi yang tinggi untuk lebih berperan dalam pengelolaan keuangan (khususnya penyusunan anggaran) karena merupakan kesempatan yang akan memberikan keuntungan atau manfaat. Keyakinan PPKD terhadap manfaat dan keuntungan implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, mengakibatkan PPKD lebih berperan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Pengimplementasian kebijakan tersebut, diperlukan prosedur akuntansi (Henley, 1992:57). Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang menjamin berfungsinya fungsi pemeriksaan intern (Henley, 1992:133).

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Hendriksen, 2005:142). Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pemeriksaan. Adanya standar akuntansi yang diterapkan, maka pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan secara efektif (Dunk, 1997: 652).

Proses pelaksanaan standar akuntansi merupakan masalah yang serius (Devas, 1989:3). Pelaksanaan standar mungkin dapat bermanfaat bagi satu pihak, namun dapat juga merugikan pihak lain. Mekanisme terbaik dalam implementasi standar merupakan faktor penting agar standar akuntansi pemerintahan dapat diterima oleh semua pihak (Mardiasmo, 2002a:149)

Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi pemerintahan didorong oleh meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja mereka (Coperchione, 2000: 387). Isu-isu yang muncul dan menjadi perdebatan dalam reformasi akuntansi pemerintahan adalah masalah dasar dan sistem pencatatan (Mardiasmo, 2002b:33), yaitu : (1) *Cash basis* dan *accrual basis*, (2) *Single entry* dan *double entry*.

#### 1) *Cash Basis dan Accrual Basis*

Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan sangat objektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya (Jones, 2000:165). Sistem akuntansi berbasis akrual diyakini menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, relevan, dan di samping memperhitungkan pengeluaran kas, juga memperhitungkan selain kas (Indra Bastian, 2001:124). Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of service*, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan

untuk menghasilkan pelayanan kepada publik (Lee, 1998:323). Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (Hoque, 2001:319).

Menurut Yamamoto (1997:4), beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah *accrual basis* ternyata tidak menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan transparansi dan efektivitas. Kasus yang terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap *accrual basis* memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan dari *cash basis* menuju *accrual basis* tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk salah satunya adalah faktor sosiologi masyarakat negara tersebut.

## 2) *Single Entry* dan *Double Entry*

*Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin gencarnya tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sebagai cita-cita reformasi, yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perubahan dari sistem *single entry* menjadi *double entry* mendesak untuk diterapkan (Mardiasmo, 2002b:33). Penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya yang tercapai oleh Pemda sebagai pengelola dana masyarakat. Alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable* (Abdul Halim, 2004:36). Kedua hal ini merupakan faktor utama dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem *double entry*, kinerja pengelola keuangan daerah dapat diukur dengan lebih baik.

## B. Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan tidak akan bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan usaha untuk mewujudkan rencana ke dalam realita nyata atau berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (Joko Widodo, 2001:191). Implementasi pengelolaan keuangan adalah pelaksanaan proses atau tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan (Daniel A., 1987:4). Pengelolaan keuangan (*financial management*) dalam organisasi pemerintah, menurut Rose (1999:167) mencakup aktivitas yang berkaitan dengan: *planning; budget setting; activity of budget implementation; budget monitoring and control; and review*.

Indikasi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah terpenuhinya norma umum anggaran daerah, sehingga terjadi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang semakin serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah (Abdul Halim, 2001:247). Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila pengelolaan keuangan lembaga sektor publik memperhatikan konsep *value for money* (VFM). Untuk implementasi konsep VFM diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja (*performance*). Konsep kinerja tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberikan manfaat (Rose, 1999:241) diantaranya: (1) efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (2) meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) biaya pelayanan yang murah; (4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan (5) meningkatkan *public cost awareness* sebagai dasar pelaksanaan *public accountability*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji besarnya pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan

daerah, terhadap peran manajerial PPKD, fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemda. Penelitian dilakukan pada Pemda di Banggai Laut. Responden adalah PPKD, pimpinan unit/sub unit/staf yang melaksanakan fungsi penganggaran, verifikasi, akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah, dan perangkat yang melaksanakan fungsi pemeriksaan intern, yaitu Inspektorat dan BPKP. Periode yang menjadi pengamatan adalah periode anggaran tahun 2017, 2018, dan 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai hubungan antar variabel yang dipilih. Berdasarkan pendapat Schindler (2001) dalam Bambang Pamungkas (2005:138), bahwa dalam penelitian kausalitas sering terjadi korelasional antar variabel, sehingga penelitian yang sesuai dengan tipe ini adalah penelitian *causal relationship* dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*).

Untuk mengetahui bobot masing-masing indikator variabel penelitian, untuk setiap variabel dilakukan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis (PCA). Analisis Komponen Utama adalah suatu cara untuk mereduksi data yang diukur dari *p*-*variats* dari *n*-individu dan mengetahui bobot untuk setiap *variats* (indikator) yang digunakan (Vincen Gaspersz, 1995:389). Konsep dasar dari PCA adalah untuk mengganti *p*-buah variabel menjadi beberapa variabel yang jumlahnya lebih sedikit tanpa kehilangan informasi dari seluruh variabel yang ada.

Langkah-langkah Analisis Komponen Utama adalah :

1. Penetapan variabel, misalnya  $X_1, X_2, \dots, X_p$

Jika satuan dari tiap variabel berlainan, sehingga terjadi perbedaan yang mencolok maka data harus distandarisasi (dibakukan). Standarisasi data dilakukan dengan mengurangi data tersebut oleh rata-ratanya dan dibagi oleh simpangan bakunya dengan rumus:

$$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{S_i}$$

Maka data baru berupa data  $Z_1, Z_2, \dots, Z_p$ .

2. Menghitung matrik korelasi R
3. Menghitung pasangan *eigenvalue* dan *eigenvector*  $(\lambda_1, e_1), (\lambda_2, e_2), \dots, (\lambda_p, e_p)$  di mana  $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_p$  berdasarkan matrik korelasi. *Eigenvalue* ditentukan dengan rumus  $|R - \lambda I| = 0$

4. Dengan variabel yang dibakukan, diperoleh komponen utama sampel

Pengaruh setiap variabel terhadap  $Y_3$  dapat ditentukan melalui nilai-nilai  $P_{Y_3X_i}, i = 1, 2$  dan  $P_{Y_3Y}$  seperti tertulis dalam persamaan struktural :

$$P_{Y_3} = P_{Y_3X_1} X_1 + P_{Y_3X_2} X_2 + P_{Y_3Y_1} Y_1 + P_{Y_3Y_2} Y_2 + P_{Y_3\epsilon_3}$$

Uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  terhadap  $Y_3$  dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : P_{Y_3X_i} = 0$$

$$H_1 : P_{Y_3X_i} > 0$$

dan

$$H_0 : P_{Y_3Y_j} = 0$$

$$H_1 : P_{Y_3Y_j} > 0$$

Nilai  $P_{Y_3X_i}$  dan  $P_{Y_3Y_j}$  merupakan koefisien jalur yang diperoleh atau dihitung berdasarkan data untuk menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis yang di muka. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis keempat adalah: Jika  $P_{Y_3X_i}$  dan  $P_{Y_3Y_j} (i = 1, 2) = 0$  :  $H_0$  tidak ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika  $P_{Y_3X_i}$  dan  $P_{Y_3Y_j} (i = 1, 2) > 0$  :  $H_0$  ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Besarnya pengaruh langsung variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  secara parsial terhadap  $Y_3$  ditunjukkan oleh koefisien determinasi masing-masing variabel independen. Nilai koefisien determinasi masing-masing variabel independen dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien jalur masing-masing variabel independen tersebut ( $P_{Y_3X_i}^2$ ) dan ( $P_{Y_3Y_i}^2$ ). Koefisien determinasi terletak dalam interval  $0 \leq (P_{Y_3X_i}^2) \leq 1$  dan  $0 \leq (P_{Y_3Y_i}^2) \leq 1$ . Apabila ( $P_{Y_3X_i}^2$ ) dan ( $P_{Y_3Y_i}^2$ ) semakin mendekati 1, semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dan sebaliknya, apabila ( $P_{Y_3X_i}^2$ ) dan ( $P_{Y_3Y_i}^2$ ) semakin mendekati 0, semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Untuk menguji pengaruh simultan variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  terhadap  $Y_3$  dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut :

$$P_{Y_3X_1} = P_{Y_3X_2} = P_{Y_3Y_1} = P_{Y_3Y_2} = 0$$

Paling sedikit ada satu  $P_{Y_3X_i}$  dan  $P_{Y_3Y_i} > 0$  ;  $i = 1, 2$

Kriteria penerimaan atau penolakan adalah:

Jika  $P_{Y_3X_1} = P_{Y_3X_2} = 0$  : secara simultan tidak ada pengaruh variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  terhadap  $Y_3$

Jika paling sedikit ada  $P_{Y_3X_i}$  ( $i = 1, 2$ )  $> 0$  : secara simultan ada pengaruh variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  terhadap  $Y_3$ .

Besarnya pengaruh secara simultan variabel  $X_i$  dan  $Y_i$  terhadap  $Y_3$  ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$  atau *R Square*). Nilai koefisien determinasi terletak dalam interval  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Apabila  $R^2$  semakin mendekati 1, semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dan sebaliknya, apabila  $R^2$  semakin mendekati 0, semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

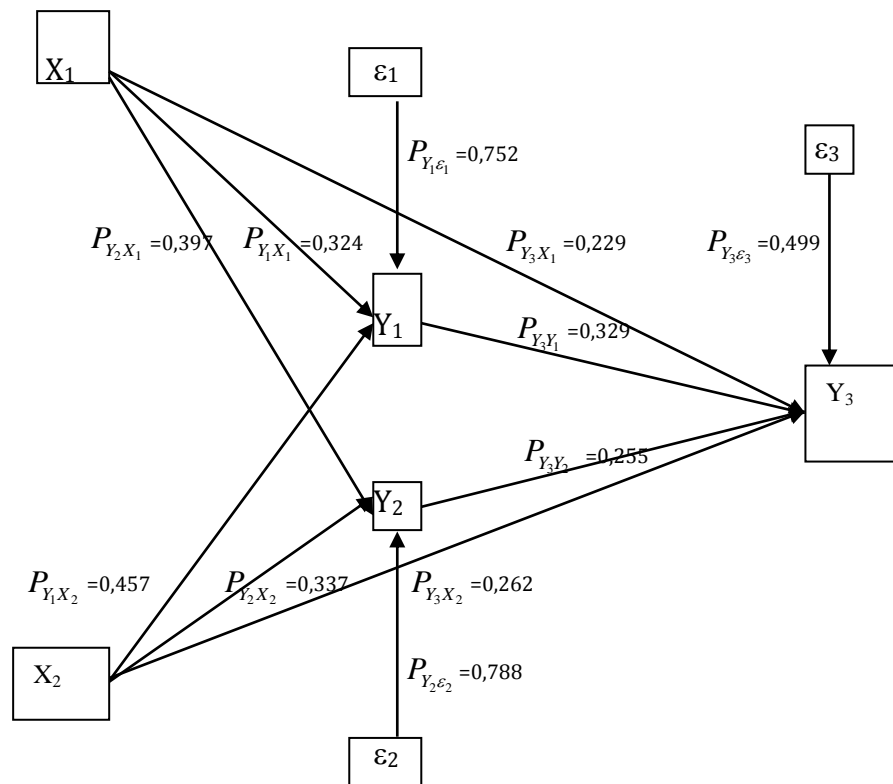
## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab masalah, tujuan, dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan, dalam sub bab ini akan diuraikan tentang hasil uji untuk masing-masing hipotesis dan pembahasan atau analisis hasil uji hipotesis tersebut. Penelitian ini dilakukan uji statistik dengan analisis jalur (*Path analysis*) dengan bantuan program SPSS untuk mengetahui dan menguji hubungan antar variabel.

### 1) Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis ketiga, persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial PPKD dan fungsi pemeriksaan intern mempunyai pengaruh yang besar baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja Pemda, dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis jalur (*Path analysis*). Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian diperoleh hasil perhitungan pengaruh secara lengkap seperti dalam Gambar berikut:





Gambar 1:  
Path Diagram Model Persamaan Struktural  
Pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  Terhadap  $Y_3$

Hasil perhitungan menunjukkan koefisien jalur secara parsial variabel persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap variabel kinerja Pemda ( $P_{Y_3X_1}$ ) sebesar 0,229. Koefisien jalur secara parsial variabel implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda ( $P_{Y_3X_2}$ ) sebesar 0,262. Koefisien jalur secara parsial variabel peran manajerial PPKD terhadap variabel kinerja Pemda ( $P_{Y_3Y_1}$ ) sebesar 0,329. Koefisien jalur secara parsial variabel fungsi pemeriksaan intern terhadap variabel kinerja Pemda ( $P_{Y_3Y_2}$ ) sebesar 0,255.

Selanjutnya dilakukan uji parsial untuk melihat pengaruh setiap variabel bebas. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Uji Hipotesis Pengaruh Secara Parsial  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  Terhadap  $Y_3$

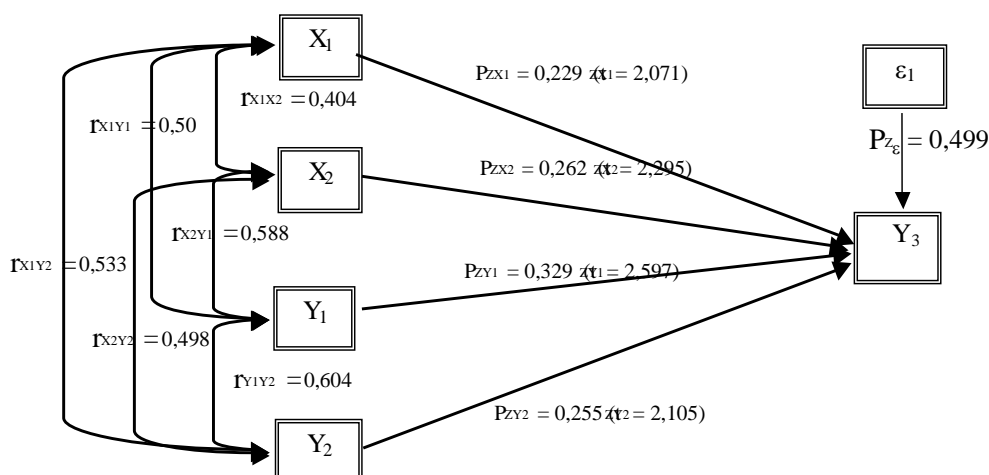
No	Hipotesis	Koefisien Jalur	Kriteria penolakan $H_0$	Kesimpulan Statistik
1	Persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemda	0,229	$P_{zx_i} (i=1,2) \neq 0$ $0,229 > 0$	Berpengaruh ( $H_0$ ditolak)
2	Implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda	0,262	$P_{zx_i} (i=1,2) \neq 0$ $0,262 > 0$	Berpengaruh ( $H_0$ ditolak)
3	Peran manajerial PPKD terhadap variabel kinerja Pemda	0,329	$P_{zx_i} (i=1,2) \neq 0$ $0,329 > 0$	Berpengaruh ( $H_0$ ditolak)
4	Fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda	0,255	$P_{zx_i} (i=1,2) \neq 0$ $0,255 > 0$	Berpengaruh ( $H_0$ ditolak)

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan nilai-nilai yang disajikan pada Tabel 1, diperoleh hasil pengujian secara parsial sebagai berikut

1. Hipotesis penelitian persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar  $0,229 > 0$ . Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Hipotesis penelitian implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar  $0,262 > 0$ . Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
3. Hipotesis penelitian peran manajerial PPKD berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar  $0,329 > 0$ . Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
4. Hipotesis penelitian fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar  $0,255 > 0$ . Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Besarnya pengaruh variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  terhadap  $Y_3$  (Substruktur 3) dikelompokkan atas pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pada Gambar 1, tergambar diagram pengaruh langsung dan tidak langsung variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  terhadap  $Y_3$ .



Berdasarkan pada koefisien jalur pada Gambar 1, dapat dihitung besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  serta variabel lain terhadap  $Y_3$  seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 : Pengaruh Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  dan  $Y_2$  Terhadap  $Y_3$

Variabel		Pengaruh Langsung (dalam %)	Pengaruh melalui (dalam %)				Total Pengaruh
			$X_1$	$X_2$	$Y_1$	$Y_2$	
$X_1$	0,229	0,052 = 5,2%		0,024 = 2,4%	0,038 = 3,8%	0,031 = 3,1%	0,146 = 14,6%
$X_2$	0,262	0,068 = 6,8%	0,024 = 2,4%		0,051 = 5,1%	0,033 = 3,3%	0,177 = 17,7%
$Y_1$	0,329	0,108 = 10,8%	0,038 = 3,8%	0,051 = 5,1%		0,051 = 5,1%	0,248 = 24,8%
$Y_2$	0,255	0,065 = 6,5%	0,031 = 3,1%	0,033 = 3,3%	0,051 = 5,1%		0,180 = 18,0%
Total pengaruh $X_1$ , $X_2$ , $Y_1$ , dan $Y_2$ terhadap $Y_3$						0,751 = 75,1%	
Pengaruh faktor lain ( $\epsilon_1$ )						0,249 = 24,9%	

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan nilai-nilai yang disajikan pada Tabel 2, diperoleh besarnya pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$ , dan  $Y_2$  terhadap  $Y_3$  sebagai berikut:

- 1) Besarnya pengaruh langsung persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemda adalah sebesar 0.052 (5,2%), pengaruh tidak langsung melalui implementasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.024 (2,4%), melalui peran manajerial PPKD sebesar 0,038 (3,8%), dan melalui fungsi pemeriksaan intern sebesar 0,031 (3,1%), serta pengaruh total sebesar 0.146 (14,6%). Dilihat dari besarnya pengaruh, persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemda, baik pengaruh secara langsung maupun secara total termasuk kelompok pengaruh kurang berarti (*negligible correlation*).
- 2) Besarnya pengaruh langsung implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda adalah sebesar 0.068 (6,8%), pengaruh tidak langsung melalui persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan sebesar 0.024 (2,4%), melalui peran manajerial PPKD sebesar 0,051 (5,1%), melalui fungsi pemeriksaan intern sebesar 0,033 (3,3%), dan pengaruh total sebesar 0,177 (17,7%). Dilihat dari besarnya pengaruh implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pemeriksaan intern, baik pengaruh secara langsung maupun secara total termasuk kelompok pengaruh kurang berarti (*negligible correlation*).
- 3) Besarnya pengaruh langsung kinerja manajerial PPKD terhadap kinerja Pemda adalah sebesar 0,108 (10,8%), pengaruh tidak langsung melalui persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan sebesar 0.038 (3,8%), melalui implementasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,051 (5,1%), melalui fungsi pemeriksaan intern sebesar 0,051 (5,1%), dan pengaruh total sebesar 0,248 (24,8%). Dilihat dari besarnya pengaruh peran manajerial terhadap kinerja Pemda, pengaruh secara langsung termasuk kelompok pengaruh kurang berarti (*negligible correlation*), sedangkan secara total termasuk kelompok pengaruh rendah (*low correlation*).
- 4) Besarnya pengaruh langsung fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda adalah sebesar 0.065 (6,5%), pengaruh tidak langsung melalui persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan sebesar 0.031 (3,1%), melalui implementasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,033 (3,3%), melalui peran manajerial sebesar 0,051 (5,1%), dan pengaruh total sebesar 0,180 (18,0%). Dilihat dari besarnya pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap fungsi pemeriksaan intern, baik pengaruh secara langsung maupun secara total termasuk kelompok pengaruh kurang berarti (*negligible correlation*).
- 5) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial PPKD, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  atau *R Square*  $0,751 > 0$ . Total pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial PPKD, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda sebesar 0,751 (75,1%) termasuk kelompok pengaruh cukup tinggi (*moderately high correlation*).
- 6) Pengaruh faktor lain terhadap fungsi pemeriksaan intern yang tidak diamati dalam penelitian ini sebesar 24,9%. Besarnya pengaruh faktor lain menunjukkan adanya faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemda. Total pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja Pemda adalah 0.146 (14,6%), dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi, semakin baik (positif) kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda. Total pengaruh implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda adalah 0,177 (17,7%) dengan arah

yang positif, yang berarti semakin baik implementasi pengelolaan keuangan daerah, semakin baik (positif) kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Total pengaruh peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pemda adalah 0,248 (24,8%) dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik peran manajerial PPKD, semakin baik (positif) kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Total pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda adalah 0,180 (18,0%) dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik fungsi pemeriksaan intern, semakin baik (positif) kinerja Pemerintah Daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti dan mengkaji pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap peran manajerial PPKD, fungsi pemeriksaan intern dan implikasinya terhadap terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Banggai Laut . Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa:

1. Persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap peran manajerial PPKD. Pengaruh persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan terhadap peran manajerial PPKD, termasuk kelompok pengaruh yang kurang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi PPKD di Banggai Laut atas realita yang dirasakan mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan kurang mempengaruhi peran manajerial PPKD.
2. Persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap fungsi pemeriksaan intern. Pengaruh secara parsial kedua variabel independen tersebut termasuk kategori pengaruh yang kurang berarti, sedangkan pengaruh simultan termasuk kelompok pengaruh rendah. Pengaruh simultan yang rendah persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pemeriksaan intern, disebabkan oleh beberapa faktor: yaitu: (1) masih adanya PPKD di Banggai Laut yang mempersepsikan bahwa implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan tidak memberikan manfaat dan tidak memberi kemudahan; (2) masih adanya implementasi pengelolaan keuangan daerah di beberapa Pemda di Banggai Laut Tengah yang belum memadai (3) masih adanya PPKD yang memiliki pengetahuan akuntansi yang belum memadai; (4) hal-hal baru yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana pengelolaan keuangan daerah; (4) masih adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa (BPK, KPK, dan Inpektorat); (5) pengaruh faktor lain terhadap fungsi pemeriksaan intern yang tidak diamati dalam penelitian ini cukup besar, yaitu: ukuran entitas, karakteristik organisasi, kompleksitas operasi entitas, sistem informasi, politik, dan peraturan perundang-undangan.
3. Persepsi PPKD mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implemementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial PPKD, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kinerja Pemda. Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dirasakan oleh PPKD di Banggai Laut sebagai hal yang memberi kemudahan dan kemanfaatan dan implementasi pengelolaan keuangan mengarah pada sistem yang terdesentralisasi, akuntabel dan transparan dapat memotivasi peran manajerial PPKD dan memperlancar fungsi pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kinerja Pemda yang memuaskan dapat tercapai. Ditinjau dari *value for money*, kinerja efektivitas lebih baik dibandingkan dengan kinerja ekonomi dan efisiensi.

## Saran

Penelitian ini, menunjukkan semua variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen, baik secara parsial maupun secara simultan. Namun, pengaruh tersebut termasuk kelompok pengaruh kurang berarti dan pengaruh rendah yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di muka. Berdasarkan hasil tersebut, diajukan saran untuk pengembangan ilmu :

- 1) Untuk meningkatkan kinerja Pemda yang baik, Pemda perlu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) segera. Untuk itu, pemda perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.
- 2) Pemda perlu melakukan inovasi dan kreasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemda harus selalu membenahi sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Peran PPKD pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern perlu ditingkatkan.
- 3) Diperlukan perubahan paradigma (*paradigm shift*) para pejabat dan pegawai Pemda untuk meresapi makna dari layanan publik (*public services*), para pegawai adalah alat untuk melayani publik, bukan sebaliknya publik harus melayani mereka. Paradigma ini harus tercermin dalam kesadaran peran (*role awareness*) dan tertuang dalam budaya organisasi (*organization culture*) pemerintah daerah. Setiap orang yang menduduki setiap posisi dalam struktur organisasi pemerintahan, harus sadar tentang peran yang harus dijalankan, sehingga setiap anggota organisasi yang bernama Pemda mempunyai referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Paradigma dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya *good governance*, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas (*accountability*), *fairness*, dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: IPP, AMP, YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Adams, Dennis A; R. Ryan Nelson; Peter Todd. 1992 "Perceived Usefulness, Ease of Use and Usage of Information Technology: a replication" *MIS Quarterly*: Vol.16, No.2 June, pp 227-247.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Standar Audit Pemerintahan*, Jakarta, 1995.
- Bamabang Pamungkas. 2005. "Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Penerapan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung*: Bandung.
- BPKP. 2000. *Manajemen Pemerintahan Baru*. Edisi I, Jakarta: BPKP
- Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly*: Vol.13, No.3 September. Pp 319-340.
- Devas, Nick. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*: Ohio, Center for International Studies Ohio University,
- Dunham, Randall B. 1984. *Organizational Behavior, People and Processes in Management*. Illinois: Homewood, Ricard D. Irwin, Inc.
- Dunk, A. and Perera, H. 1997. "The Incidence of Budgetary Slack: A Field Study Exploration", *Accounting Auditing and Accountability Journal*. 10 (5), 649-664.
- Hendriksen, M.C. and Breda M.F. Van. 2005. *Accounting Theory*. 7<sup>th</sup> Ed. Boston,: Ricard D. Irwin.

- Hoque, Zahirul and Jodie Moll. 2001. "Public Sector Reform, Implications for Accounting, Accountability and Performance of State-Owned Entities-an Australian Perspective", *The International Journal of Public Sector Management*: Vol.14 No.4, pp.304-326.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, PPA FE UGM,
- Jones, Rowan and Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. 4<sup>th</sup> Ed. London: Pitman.
- Lee, R. & Ronald W. Johnson. 1998. *Public Budgeting Systems*. 6<sup>th</sup> Ed. Maryland: Aspen Publishers, Inc.
- Mardiasmo. 1999. "The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management". *A Thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY, International Development Department School of Public Policy The University of Birmingham*: Birmingham.
- \_\_\_\_\_. 2002b. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rose, Aidan and Alan Lawton. 1999. *Public Services Management*. England: Pearson Education Limited, First Published in Great Britain, Prentice Hall.
- Vinsent Gaspersz, 1995. *Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan*. Bandung: Penerbit Transito.
- Yamamoto, Kiyoshi. 1997. "Accounting System Reform and Public Management in Local Governments". *The 6th CIGAR Conference of Local Government Accounting*: Paris.